

# GERFASIUS DARMONO

*by* UNITRI Press

---

**Submission date:** 12-Dec-2022 10:27AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1897786666

**File name:** GERFASIUS\_DARMONO.docx (211.88K)

**Word count:** 953

**Character count:** 6530

8

**PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

**(Studi di Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Kota Batu))**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**GERFASIOUS DARMONO**

**NIM 2017210066**

3

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI**

**MALANG**

**2021**

## RINGKASAN

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik masyarakat, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang pelayanan izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batu dan PTSP Penanaman Modal. Pelayanan izin mendirikan bangunan merupakan sarana untuk mengukur keberhasilan pelayanan pada DPMPSTP dan Tenaga Kerja Kota Batu pada prosedur pelayanan perizinan yang dilakukan oleh DPMPSTP dan Tenaga Kerja Kota Batu. Observasi, wawancara, dan dokumentasi tertulis digunakan untuk mengumpulkan data untuk studi deskriptif kualitatif ini.

Pelayanan izin mendirikan bangunan disediakan oleh DPMPSTP dan Tenaga Kerja Kota Batu, menurut temuan kajian belum maksimal atau belum efektif, hal ini terlihat pada penyelesaian izin mendirikan bangunan yang tidak tepat waktu, kurangnya tim teknis mengakibatkan beban kerja lebih banyak, kurang mandiri dalam memberikan pertimbangan dan keputusan dan masih adanya ketidakjelasan tata cara pemeliharaan gedung.

**Kata Kunci** : Pelayanan, Izin Mendirikan Bangunan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Di Indonesia, salah satu tugas yang belum sesuai dengan harapan adalah peningkatan pelayanan public dan penyelesaian secara menyeluruh. Pelayanan publik merupakan kebutuhan setiap orang, bahkan dapat dikatakan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Masyarakat dan pemerintah berinteraksi terutama melalui pelayanan publik. Menanggapi tuntutan masyarakat akan pelayanan prima untuk memuaskan masyarakat, maka pemerintah mengupayakan kualitas yang maksimal. Setiap bantuan, termasuk pusat, legislatif biasa, dan pemerintah daerah/daerah, perlu mengakui administrasi publik yang luar biasa.

Pada dasarnya, bantuan publik menggabungkan kegiatan kehidupan yang berbeda. Pemerintah negara bagian bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai layanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Peraturan atau layanan lain yang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, utilitas, dan sebagainya, merupakan contoh dari layanan tersebut (Mohammad, 2003).

Disebutkan antara lain dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa diperlukan norma hukum yang jelas untuk menjamin terpenuhinya tanggung jawab negara dan korporasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik serta menegakkan hak dan kewajiban masyarakat. Namun, harus ada peningkatan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Banyaknya keluhan masyarakat pengguna layanan menunjukkan bahwa sistem pelayanan yang dapat diterima belum sepenuhnya dikembangkan oleh berbagai instansi

pemerintah. Kepercayaan publik terhadap institusi publik diperkirakan akan menurun sebagai akibatnya. Tingkat kepercayaan publik lembaga publik Indonesia (Nunik, 2011).

Pemerintah daerah mungkin yang paling terlibat langsung dalam pelayanan perizinan kepada masyarakat karena mereka memberikan pelayanan. Karena perizinan memengaruhi pendapatan masyarakat dan lingkungan usaha, administrasi yang dikelola negara bagian setempat juga sangat tertarik untuk mengizinkan administrasi. Pajak daerah, retribusi dan izin juga dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan daerah. Namun, pemerintah pusat mempertahankan kontrol regulasi dengan membandingkan kebijakan, terutama untuk menghindari pelarangan izin dan pungutan biaya dan pajak yang berlebihan.

Cara paling ideal untuk memberikan lisensi untuk administrasi publik dilacak melalui metode. Ini menentukan bagaimana lisensi digunakan. Administrasi publik memiliki siklus dan aliran, dan masyarakat umum dapat menggunakan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya untuk memperoleh administrasi yang diperlukan untuk mendapatkan lisensi. <sup>10</sup> Pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, sederhana, transparan, pasti, dan terjangkau merupakan salah satu maksud dan tujuan penyelenggaraan pelayanan perizinan. meningkatkan hak individu dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Ningsih & Hardianto, 2019).

Contoh izin resmi adalah izin bangunan yang diberikan sebagai bagian dari pelayanan publik. Kepala daerah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada pemilik bangunan untuk pembangunan gedung baru, perubahan gedung yang sudah ada, perluasan atau pengurangan gedung, dan pemeliharaan gedung sesuai dengan persyaratan teknis dan tarif yang berlaku. <sup>7</sup> Layanan perizinan IMB disediakan oleh organisasi seperti Dinas Tenaga Kerja Kota Batu dan PTSP Penanaman Modal. Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja PTSP terutama bertanggung jawab atas pengembangan modal dan urusan administrasi umum. Sebelum membangun atau

mengubah bangunan, masyarakat terlebih dahulu harus mendapatkan izin mengenai kelayakan, kenyamanan, keamanan bangunan masa depan, dan kepastian hukum sesuai dengan persyaratan Izin Mendirikan Bangunan.

Namun dalam praktiknya tidak semuanya berjalan sesuai rencana karena sebagian masyarakat masih belum memahami bahwa pajak atau iuran yang telah mereka bayarkan untuk izin mendirikan bangunan (IMB) dapat membantu pembangunan daerah (Irfansyah, 2015). Banyak masalah juga sering muncul dalam skenario ini. Apalagi, karena kebutuhan yang berbelit-belit, banyak kalangan yang masih mengeluhkan penerbitan izin bangunan (IMB).

Karakteristik tersebut di atas juga menunjukkan bahwa wilayah yang belum terlayani tetap lebih besar daripada wilayah yang terlayani. Meski antusias masyarakat cukup tinggi, namun mereka enggan mengajukan IMB karena pelayanan yang tidak efisien dan proses pengajuan yang diperpanjang. Hal ini disebabkan petugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang kurang baik selain faktor geografis. Konsekuensinya, penyedia layanan publik harus meningkatkan kualitas layanan pelanggan karena kualitas pada akhirnya ditentukan oleh pelanggan.

Indikasi permasalahan tersebut menggugah minat penulis untuk melakukan penelitian “Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Studi di Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Kota Batu)”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan fenomena yang telah disebutkan di latar belakang:

1. Bagaimana pengurusan izin mendirikan bangunan di Dinas Penanaman Modal PTSP dan Disnaker Kota Batu?

2. Faktor-faktor yang membantu dan menghentikan Dinas Penanaman Modal PTSP dan Disnaker Kota Batu dalam memberikan izin mendirikan bangunan?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai ditetapkan sehubungan dengan rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan yaitu:

1. Mengetahui pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal PTSP dan Disnaker Kota Batu dalam pemberian izin mendirikan bangunan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang membantu dan menghambat Dinas Penanaman Modal PTSP dan Disnaker Kota Batu dalam pemberian izin mendirikan bangunan.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah kelebihan dari penelitian penulis:

1. Bagi peneliti untuk dijadikan sebagai bahan sumber sehingga dapat memperoleh ilmu secara langsung dari Dinas IMB Kota Batu, memperluas ilmunya, dan mempraktekkan teori-teori yang dipelajari di perkuliahan.
2. untuk digunakan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan oleh Kantor Pelayanan IMB.
3. Bagi peneliti sejenis untuk digunakan sebagai dasar pembanding pada penelitian selanjutnya.

# GERFASIUS DARMONO

## ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://publikasi.unitri.ac.id">publikasi.unitri.ac.id</a> Internet Source	4%
2	<a href="http://repository.ummat.ac.id">repository.ummat.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://rinjani.unitri.ac.id">rinjani.unitri.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	2%
5	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	1%
6	<a href="http://e-journal.stkip-amlapura.ac.id">e-journal.stkip-amlapura.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://siskotkln.bnp2tki.go.id">siskotkln.bnp2tki.go.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	1%



10 repository.uin-suska.ac.id 1 %  
Internet Source

---

11 dpupr.surakarta.go.id 1 %  
Internet Source

---

12 muhammadirhamgallery.wordpress.com 1 %  
Internet Source

---

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On